ABSTRAK

Ahmad Arizal Subakti, 1213010006, 2025 : Analisis Yuridis Tentang Isbat Nikah Wali Muhakkam (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0242/Pdt.P/2020/PA.Bks).

Latar belakang masalah penelitian ini berawal dari penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0242/Pdt.P/2020/PA.Bks menggunakan wali muhakkam, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) dinyatakan bahwa wali nikah hanya terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: Dasar pertimbangan hakim dan dasar hukum hakim serta menganalisis hukum atas penetapan hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara nomor 0242/Pdt.P/2020/PA.Bks tentang isbat nikah yang menggunakan wali muhakkam dalam perkawinannya.

Kerangka berpikir dari penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum demi terciptanya keadilan, teori tersebut digunakan untuk memahami bagaimana hakim dalam proses penetapan isbat nikah wali muhakkam berupaya menciptakan keputusan yang memberikan kepastian hukum serta bagaimana interpretasi norma hukum dilakukan dalam situasi yang tidak jelas atau ambigu, guna menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Metode penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan, termasuk analisis isi terhadap penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0242/Pdt.P/2020/PA.Bks tentang isbat nikah wali muhakkam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memandang sah penggunaan wali muhakkam karena calon mempelai perempuan adalah seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab, serta mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang menyerahkan urusan pernikahan kepada tokoh agama. Landasan hukum yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) j.o PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) dan (KHI) Pasal 7 dan Pasal 14 tentang sahnya perkawinan, KHI Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) tentang isbat nikah, Permenag Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) tentang wali nikah, Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah tentang wali sulthan, serta pendapat Ulama dalam kitab Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj fi al-Fiqh 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i dan Fiqh Sunah tentang kedudukan wali muhakkam, l'anatut Thalibin dan Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin tentang pengakuan sebagai alat bukti sempurna, serta kaidah fiqh tentang kebolehan yang dilarang dalam keadaan darurat dan memilih darurat yang lebih ringan ketika berkumpulnya dua darurat. Hakim menggunakan pendekatan interpretatif dengan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kata kunci: Isbat, Muhakkam dan Hakim